



Realisasi Pendapatan Capai Rp9,02 Triliun

Realisasi Pendapatan Capai Rp9,02 Triliun

MAKASSAR, FAJAR — Realisasi pendapatan Pemprov Sulsel mencapai Rp9,02 triliun. Hingga November, tercatat 88,76 persen dari target. Pemprov Sulsel pada APBD 2024 memiliki target Rp10,16 triliun pendapatan daerah. Kepala Badan Pendapatan

Daerah (Bapenda) Sulsel Reza Faisal Saleh memaparkan, realisasi dengan persentase terendah tercatat pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni sebesar Rp4,8 triliun dari target Rp5,5 triliun atau 87,4 persen. Lalu, untuk Dana Transfer

diberi target 4,6 triliun dengan realisasi mencapai Rp4,2 triliun dan 90,7 persen. Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan target Rp8,9 miliar sudah melampaui dengan realisasi Rp9,3 miliar.

Baca Realisasi... Hlm 11

Realisasi Pendapatan Capai Rp9,02 Triliun

❖ Lanjutan Halaman... 9

"Kalau dari tiga item itu di PAD (terendah). Tapi memang ini masih on the track, karena kalau bicara potensi PAD memang besar di Desember ini," ujar Reza, kemarin.

Lanjut Reza, target PAD bisa tercapai pada Desember ini sebab Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memang banyak terbayarkan pada akhir tahun. Kata Reza, bulan jatuh tempo itu banyak di Desember.

"Ini hari memang yang masih kita berpeluang menagih. Bicara pertumbuhan November ke Desember, pendapatan daerah itu bertumbuh 9,24 persen. Tahun lalu di posisi bulan yang sama itu hanya Rp8,2 triliun realisasi, sekarang Rp9,02

triliun," ungkapnya.

Pada Desember ini, dengan progres yang ada ia yakin PKB melebihi target. Selama ini, terang Reza, bahwa PKB selalu menyumbang surplus bagi pendapatan daerah.

Demi mendorong realisasi PKB, Bapenda melakukan pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan pada momentum hari besar tertentu. Salah satunya yang digelar menjelang Nataru ini.

"Realisasi sekarang kita optimis di sisa satu bulan ini dengan potensi yang dikejar terus, kita optimis bisa capai target 100 persen," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulsel Salehuddin menyebutkan, realisasi belanja per 29 November

di angka 78 persen. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menjadi realisasi tertinggi setelah semua dana Pilkada telah cair.

Biro Hukum salah satu yang paling rendah akibat adanya penganggaran di APBD Perubahan untuk ganti rugi lahan di Sudiang. "Terkait dengan pengelolaan DAK ada di Labkesda memang belum cair. Di Biro Hukum juga dana perubahan belum cair. Belum masuk ganti rugi Sudiang, sementara proses mereka," bebarnya.

Bobby, sapaannya, yakin bahwa realisasi belanja bisa melebihi tahun 2023. November tahun lalu di angka 72 persen dengan realisasi mencapai 93 persen.

"Ini kan, (sudah) 78

persen. Insyallah optimis di atas 95 persen. Target Bapenda lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya capaian realisasinya," tukasnya.

Sejauh ini, kata Bobby, baru satu item yang dipastikan menjadi Sisa Lebih Penganggaran (Silpa) APBD 2024. Yaitu anggaran untuk pembuatan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Stadion Sudiang oleh Dinas Kehutanan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (DLHK).

"Kemungkinan besar nyebrang (tahun). Karena Kadis DLHK tak mau kerjakan, karena syaratnya ada pengerjaan (DED) dulu baru jalan. Kemungkinan dianggarkan kembali tahun depan," ungkap Bobby. (uca)